



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari

- 1 Laporan Realisasi Anggaran,
- 2 Neraca,
- 3 Laporan Operasional,
- 4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5 Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan pemerintah dan penyusunannya harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD akan dikompilasi dan dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tapin

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

Laporan keuangan SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2024 ini disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin selama satu periode pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah

- 1 Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
- 2 Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin
- 3 Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 adalah

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong,
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara,
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara,
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024,
- 16 Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrual,
- 17 Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin,
- 18 Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.



1 3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

- 1 1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1 2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1 3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SKPD

- 2 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2 2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan SKPD

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3 1 Pendapatan
- 3 2 Belanja
- 3 3 Pendapatan – LO
- 3 4 Beban
- 3 5 Aset
- 3 6 Kewajiban
- 3 7 Ekuitas

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing sasaran, program dan kegiatan telah diuraikan dalam Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024

Realisasi belanja terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari alokasi dana sebesar **Rp. 13.743.121.859,00** (*Tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*) **83,91%** dari anggaran sebesar **Rp. 16.377.888.751,00** (*Enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*)

Capaian kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024

Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.592.200,00	Rp 25.012.100,00	97,73
a Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6.905.000,00	Rp 6.776.000,00	98,13
b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 6.905.000,00	Rp 6.886.400,00	99,73
c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 11.782.200,00	Rp 11.349.700,00	96,33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.203.962.696,00	Rp 3.146.118.197,00	98,19
a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.197.697.696,00	Rp 3.140.119.097,00	98,20
b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.265.000,00	Rp 5.999.100,00	95,76
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 83.427.730,00	Rp 79.461.532,00	95,25
a Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 40.915.250,00	Rp 37.391.532,00	91,39
b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 42.512.480,00	Rp 42.070.000,00	98,96



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1 946 138 124,00	Rp 1 842 630 867,00	94,68
a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 250 542 564,00	Rp 189 813 080,00	75,76
b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 233 010 880,00	Rp 209 278 872,00	89,82
c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 14 378 680,00	Rp 14 050 500,00	97,72
d Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 9 000 000,00	Rp 8 945 000,00	99,39
e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1 439 206 000,00	Rp 1 420 543 415,00	98,70
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 514 723 434,00	Rp 161 562 162,00	31,39
a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 514 723 434,00	Rp 161 562 162,00	31,39
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 656 572 680,00	Rp 423 918 880,00	64,57
a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 104 615 830,00	Rp 84 546 880,00	80,82
b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 551 956 850,00	Rp 339 372 000,00	61,49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4 091 166 416,00	Rp 2 511 588 030,00	61,39
a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 77 546 200,00	Rp 65 451 776,00	84,40
b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 20 765 702,00	Rp 5 860 000,00	28,22
c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 3 992 854 514,00	Rp 2 440 276 254,00	61,11
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 1 182 109 989,00	Rp 1 042 886 054,00	88,22
a Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 600 448 289,00	Rp 522 289 600,00	86,98
b Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Rp 581 661 700,00	Rp 520 596 454,00	89,50
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 9 921 000,00	Rp 9 918 000,00	99,97
a Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 9 921 000,00	Rp 9 918 000,00	99,97
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1 978 216 337,00	Rp 1 959 989 067,00	99,08
a Pelayanan Antar Kerja	Rp 8 794 000,00	Rp 8 784 000,00	99,89
b Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp 17 027 000,00	Rp 16 945 800,00	99,52
c Perluasan Kesempatan Kerja	Rp 1 952 395 337,00	Rp 1 934 259 267,00	99,07
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 1 121 168 465,00	Rp 1 046 967 970,00	93,38
a Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp 1 073 767 400,00	Rp 1 001 916 770,00	93,31
b Job Fair/Bursa Kerja	Rp 47 401 065,00	Rp 45 051 200,00	95,04



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 109 110 150,00	Rp 104 367 800,00	95,65
a Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Rp 9 036 400,00	Rp 8 923 000,00	98,75
b Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Rp 100 073 750,00	Rp 95 444 800,00	95,37
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 53 973 280,00	Rp 31 911 200,00	59,12
a Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp 21 233 380,00	Rp 12 275 000,00	57,81
b Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp 32 739 900,00	Rp 19 636 200,00	59,98
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1 401 806 250,00	Rp 1 356 790 000,00	96,79
a Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 87 762 750,00	Rp 82 688 800,00	94,22
b Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 76 710 700,00	Rp 68 550 000,00	89,36
c Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp 1 237 332 800,00	Rp 1 205 551 200,00	97,43
Jumlah	Rp 16 377 888 751,00	Rp 13 743 121 859,00	83,91

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, antara lain

- 1 Kondisi keuangan daerah dalam keadaan defisit sehingga ada belanja yang terutang yang menyebabkan tidak tercapainya target



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan
3. Kurang optimalnya pengendalian atas kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan tidak dapat segera diatasi
4. Sarana dan prasarana untuk kegiatan administrasi masih kurang memadai
5. Masih rendahnya tingkat produktivitas masyarakat/pencari kerja yang ada
6. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kemajuan dampak program dan kegiatan

Sebagaimana diketahui bahwa pemecahan terhadap masalah ketenagakerjaan sangat membutuhkan upaya yang terpadu, terkoordinasi dan terencana dari banyak pihak yang terkait. Selain itu prasyarat utama lainnya yang harus dimiliki adalah adanya komitmen untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap aspek pembangunan yang benar-benar kuat dari semua pihak mulai dari tingkat kebijakan hingga tingkat pelaksana untuk menjamin bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan yang telah dirumuskan dapat terwujud menjadi rangkaian kegiatan yang efektif. Perlu disadari bahwa sesungguhnya otoritas penciptaan kesempatan kerja yang ada pada Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan adalah penyaluran mekanisme pasar kerja, pelatihan, pembinaan hubungan industrial, serta peningkatan produktivitas, sedangkan penciptaan kesempatan kerja yang terkait dengan perekonomian dan kebijakan lainnya secara praktis berada pada fungsi instansi lain, bukan pada instansi ketenagakerjaan. Selain itu, mengingat cakupan bidang ketenagakerjaan tersebut sangat luas dan rumit, maka peran aktif seluruh pihak menjadi salah satu kunci utama kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan.



BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Pendapatan

Jumlah realisasi pendapatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00

3.2 Belanja

Struktur Belanja sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

- a Belanja Operasi,
- b Belanja Modal,
- c Belanja Tak Terduga, dan
- d Belanja Transfer

Realisasi belanja secara keseluruhan periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 13 743.121.859,00 atau 83,91% dari anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp 16 377 888.751,00 dan realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp 13 289.199 642,00 yang terdiri dari

Tabel 3 2 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	15 473 857 953,00	13 241 560 859,00	85,57	13 031 919 282,00
2	Belanja Modal	904 030 798 00	501 561 000,00	55,48	257 280 360,00
Jumlah Belanja		16 377 888 751,00	13 743 121 859,00	83,91	13 289 199 642,00

3.2.1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun 2024 adalah sebesar Rp 13 241.560 859,00 atau 85,57% dari anggaran belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp 15.473 857.953,00 dan realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp 13 031.919 282,00 yang terdiri dari



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

Tabel 3 2 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	3 214 237 696,00	3 154 579 097,00	98,14	3 099 312 178,00
2	Belanja Barang dan Jasa	12 259 620 257,00	10 086 981 762,00	82,28	9 932 607 104,00
Jumlah		15 473 857 953,00	13 241 560 859,00	85,57	13 031 919 282,00

3 2 1 1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp 3.154.579.097,00** **(98,14%)** merupakan realisasi pembayaran dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3 2 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1 148 688 726,00	1 148 688 726,00	100,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	35 239 600,00	32 036 000,00	90,91
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98 981 580,00	92 301 830,00	93,25
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4 228 752,00	3 844 320,00	90,91
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	108 010 000,00	108 010 000,00	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	89 880 000,00	89 880 000,00	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5 940 000,00	5 400 000,00	90,91
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13 986 000,00	12 950 000,00	92,59
Belanja Tunjangan Beras PNS	61 730 084,00	57 573 900,00	93 27
Belanja Tunjangan Beras PPPK	2 389 860,00	2 172 600,00	90,91
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	116 007 232,00	116 002 587,00	100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 999 566,00	86 907,00	4,35
Belanja Pembulatan Gaji PNS	87 141,00	18 175,00	20 86
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3 000,00	693,00	23,10
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	571 686 020,00	561 630 071,00	98,24
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	20 466 155,00	10 600 892,00	51,80
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	89 482 014,00	89 165 944,00	99,65
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	819 891 966,00	806 462 106,00	98,36



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

Jenis Belanja		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	9 000 000,00	3 294 346,00	36,60
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16 540 000,00	14 460 000,00	87,42
	Jumlah	3 214 237 696,00	3 154 579 097,00	98,14

3 2.1 2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 10 086 981 762,00 (82,28%) merupakan realisasi pembayaran dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3 2 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	48 210 300,00	42 954 400,00	89,10
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	38 896 400,00	35 323 502,00	90,81
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	347 657 509,00	294 922 028 00	84,83
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10 697 000,00	10 490 299,00	98,07
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	117 430 400,00	105 317 568,00	89,69
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	68 613 700,00	58 167 300,00	84,78
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71 389 300,00	51 535 000,00	72,19
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	164 345 060,00	149 122 200,00	90,74
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13 941 700,00	11 895 000,00	85,32
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	69 078 400,00	44 052 100,00	63,77
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	365 600,00	320 000 00	87,53
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	52 763 300,00	45 135 372,00	85,54
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36 266 800,00	27 758 700,00	76,54
Belanja Obat-Obatan Lainnya	784 000 00	0,00	0,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	630 217 410,00	630 203 110,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	398 608 600,00	368 321 200,00	92 40
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17 497 500 00	17 378 800,00	99,32
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	303 032 350,00	283 932 000,00	93,70



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	36 576 000,00	36 000 000,00	98,43
Belanja Pakaian Adat Daerah	42 899 100,00	39 650 000,00	92,43
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	123 850 000,00	118 500 000,00	95,68
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37 950 000,00	32 000 000,00	84,32
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19 800 000,00	19 800 000,00	100,00
Belanja Tenaga Administrasi	986 600 000,00	919 350 000,00	93,18
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3 000 000,00	3 000 000 00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	118 300 000,00	102 700 000,00	86,81
Belanja Jasa Tenaga Ahli	42 400 000,00	42 400 000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	55 600 000,00	52 400 000,00	94,24
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	39 600 000,00	37 200 000,00	93,94
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	50 000 000,00	45 045 046,00	90 09
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2 122 200,00	2 122 000,00	99,99
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	31 000 000,00	27 500 000,00	88,71
Belanja Tagihan Air	15 007 500,00	4 760 000,00	31,72
Belanja Tagihan Listrik	60 003 680 00	60 003 680,00	100,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38 104 650,00	27 440 856,00	72,01
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2 900 000,00	1 404 800,00	48,44
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	735 696 000,00	714 565 200,00	97 13
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	501 012 000,00	490 986 000,00	98,00
Belanja Sewa Lapangan Lainnya	23 131 980,00	23 130 000,00	99 99
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	13 263 750,00	8 200 000,00	61,82
Belanja Sewa Mebel	488 085 00	0,00	0 00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	30 029 130,00	27 600 000,00	91,91
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	23 131 980,00	23 130 000,00	99,99
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	202 725 757,00	202 725 757 00	100 00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	110 000 000,00	8 950 000,00	8,14
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	308 383 514,00	204 304 189 00	66,25
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100 000 000,00	0,00	0,00



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100 000 000,00	0,00	0,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	420 000 000,00	420 000 000,00	100,00
Belanja Bimbingan Teknis	720 000 000,00	720 000 000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9 549 900,00	4 483 175,00	46,94
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20 765 702 00	5 860 000 00	28 22
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3 426 728 000,00	2 084 079 065,00	60,82
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 208 831 000,00	1 202 938 415,00	99,51
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210 375 000,00	197 925 000,00	94,08
Jumlah	12 259 620 257,00	10 086 981 762,00	82,28

3 2 2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal secara keseluruhan periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 501 561 000,00** atau **55,48%** dari anggaran belanja modal tahun 2024 sebesar **Rp. 904 030 798,00** dan realisasi tahun 2023 adalah sebesar **Rp 257 280 360,00** yang terdiri dari

Tabel 3 2 5
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	904 030 798 00	501 561 000,00	55,48	257 280 360,00
Jumlah		904 030 798,00	501 561 000,00	55,48	257 280 360,00

3 2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 501 561 000,00** merupakan realisasi pembayaran dengan rincian sebagai berikut



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

Tabel 3 2 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	23 824 337,00	23 824 324,00	100,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	79 707 600,00	69 466 000,00	87,15
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6 972 974,00	6 972 973,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	17 459 459,00	17 459 459,00	100,00
Belanja Modal Mebel	31 093 872,00	29 205 405,00	93,93
Belanja Modal Alat Pendingin	54 114 200,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 153 153,00	3 153 153,00	100,00
Belanja Modal Meja Pejabat	20 471 116,00	8 716 216,00	42,58
Belanja Modal Kursi Pejabat	24 468 849,00	22 448 154,00	91,74
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	19 694 000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	334 957 840,00	230 090 090,00	68,69
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	269 566 798,00	73 648 649,00	27,32
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	18 546 600,00	16 576 577,00	89,38
Jumlah	904 030 798,00	501 561 000,00	55,48

3.3. Pendapatan - LO

Jumlah realisasi Pendapatan - LO pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah **Rp. 0,00** dan **Rp. 0,00**

3.4. Beban

Beban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 12 520 674 731,62** dan **Rp. 14 509 776 152,00** terdiri dari sebagai berikut

Tabel 3 4 1
Rincian Beban Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik (turun) %
Beban Pegawai	3 147 796 097,00	3 099 312 178,00	1,56
Beban Barang dan Jasa	9 078 097 661,04	11 219 105 085,00	-19,08
Beban Penyusutan dan Amortisasi	294 780 973,58	191 358 889,00	54,05
JUMLAH	12 520 674 731,62	14 509 776 152,00	-13,71

3.4.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2024 adalah **Rp. 3 147 796 097,00** dan tahun 2023 adalah **Rp. 3 099 312 178,00** Beban



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal Rincian beban pegawai untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 3 4 2
Rincian Beban Pegawai Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	1 148 688 726,00
Beban Gaji Pokok PPPK	32 036 000,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	92 301 830,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	3 844 320,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	108 010 000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	89 880 000,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5 400 000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	12 950 000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	57 573 900,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	2 172 600,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	116 002 587,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	86 907,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	18 175,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	693,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	561 630 071,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10 600 892,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	89 165 944,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	806 462 106,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3 294 346,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7 677 000 00
Jumlah	3 147 796 097,00

3.4.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2024 adalah sebesar **Rp 9.078.097.661,04** dan tahun 2023 adalah sebesar **Rp 11.219.105.085,00**. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap
Rincian beban barang dan jasa untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 3.4.3
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	42 954 400,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35 323 502,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	294 922 028,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10 490 299,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	105 317 568,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59 140 800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	50 496 600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	149 122 200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11 895 000 00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	44 052 100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	320 000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45 135 372,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27 758 700,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	900 000 00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	368 321 200 00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17 378 800,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	283 932 000,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	36 000 000 00
Beban Pakaian Adat Daerah	39 650 000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	118 500 000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	32 000 000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19 800 000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	919 350 000,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	3 000 000 00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	102 700 000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	42 400 000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	52 400 000 00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	37 200 000,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	45 045 046,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2 122 000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	27 500 000,00
Beban Tagihan Telepon	(101 900 00)
Beban Tagihan Air	4 533 000,00
Beban Tagihan Listrik	60 003 680,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	27 542 756,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1 404 800,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	714 565 200 00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	490 986 000,00



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)
Beban Sewa Lapangan Lainnya	23 130 000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	8 200 000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	27 600 000,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	23 130 000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	107 763 000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	55 652 255,04
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	97 860 900,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	98 589 700,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	420 000 000,00
Beban Bimbingan Teknis	720 000 000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4 483 175,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5 860 000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 760 904 065,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 202 938 415,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	197 925 000,00
Jumlah	9 078 097 661,04

3.4.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 adalah **Rp 294 780 973,58** dan tahun 2023 adalah **Rp 191 358 889,00**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disesuaikan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.4
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	250 506 073,58
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	44 274 900,00
Jumlah	294 780 973,58



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

3.5 Aset

3.5.1 Aset Lancar

Jumlah aset lancar tahun 2024 adalah sebesar **Rp 1 038 400,00** dan tahun 2023 adalah sebesar **Rp 937.500,00** yang terdiri dari

3 5 1 1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

3 5.1.2. Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

3 5.1 3. Persediaan

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
Persediaan	1 038 400,00	973 500,00

Jumlah persediaan tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 1 038 400,00** dan **Rp 937 500,00** Berikut rincian persediaan pada tahun 2024 dan 2023

Tabel 3 5 1
Daftar Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	0,00	973 500,00
2	Kertas dan Cover	1 038 400,00	0,00
	Jumlah	1 038 400,00	973 500,00

3 5 2. Aset Tetap

Jumlah aset tetap tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 3 222 113 872,17** dan tahun 2023 adalah sebesar **Rp 2 917 567 273,00** yang terdiri dari

3 5 2 1. Tanah

	TA 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)
Tanah	1 799 450 000,00	1 799 450 000,00



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

Saldo tanah tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 1 799 450 000,00** dan **Rp 1.799 450 000,00** Berikut rincian tanah pada tahun 2024 dan 2023

Tabel 3 5 2
Rincian Tanah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 799 450 000,00	1 799 450 000 00
	Jumlah	1 799 450 000,00	1 799 450 000,00

Rincian mutasi tanah selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut

Tabel 3 5 3
Rincian Mutasi Tanah Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	1 799 450 000,00
Penambahan	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	1 799 450 000,00

3 5 2 2 Peralatan dan Mesin

	TA. 2024 (Rp)	TA. 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	1 915 292 726,00	1 313 361 772,00

Saldo peralatan dan mesin tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 1.915 292 726,00** dan **Rp 1 313 361 772,00** Berikut rincian peralatan dan mesin tahun 2024

Tabel 3 5 4
Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Electric Generating Set	29 082 800 00
2	Alat Bantu Lainnya	23 824 324 00
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	121 537 000,00
4	Peralatan Tukang Kayu	357 600,00
5	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	40 705 485,00
6	Alat Kantor Lainnya	46 581 523 00
7	Mebel	168 906 766,00
8	Alat Pembersih	11 132 800 00
9	Alat Pendingin	110 299 736,00
10	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32 188 496,00
11	Meja Kerja Pejabat	34 012 676,00
12	Kursi Kerja Pejabat	23 563 154,00
13	Kursi Rapat Pejabat	18 903 000,00
14	Lemari dan Arsip Pejabat	20 755 000,00



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

15	Peralatan Studio Audio	58 766 342,00
16	Peralatan Studio Video dan Film	214 694 221 00
17	Alat Studio Lainnya	3 150 000 00
18	Alat Komunikasi Telephone	2 192 000,00
19	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	14 000 000,00
20	Personal Computer	436 963 941,00
21	Komputer Unit Lainnya	366 794 285,00
22	Peralatan Mainframe	98 500,00
23	Peralatan Mini Computer	29 025 000,00
24	Peralatan Personal Computer	9 351 500,00
25	Peralatan Komputer Lainnya	92 006 577 00
26	Suara	6 400 000,00
	Jumlah	1 915 292 726,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut

Tabel 3 5 5
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	1 313 361 772 00
Penambahan (berupa belanja modal-pengadaan peralatan dan mesin)	635 318 342,00
Pengurangan (berupa barang ekstrakom, reklasifikasi peralatan mesin ke aset rusak berat (asset lainnya)	33 387 388,00
Saldo per 31 Desember 2024	1 915 292 726,00

3.5 2 3. Gedung dan Bangunan

	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
Gedung dan Bangunan	2 231 931 000,00	2 231 931 000,00

Saldo gedung dan bangunan tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp. 2 231 931 000,00** dan **Rp. 2 231 931.000,00** Berikut rincian gedung dan bangunan pada tahun 2024

Tabel 3 5 6
Rincian Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	762 483 000 00
2	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	860 269 000 00
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	530 864 000,00
4	Bangunan Gedung Garasi/Pool	5 760 000,00
5	Rumah Negara Golongan II	58 955 000 00
6	Pagar	13 600 000 00
	Jumlah	2 231 931 000,00



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

Rincian mutasi gedung dan bangunan selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut

Tabel 3 5 7
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	2 231 931 000, 00
Penambahan	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	2 231 931 000, 00

3.5.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 adalah **Rp 2.724.559.853,83** Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 3 5 8
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1 915 292 726,00	832 634 928,83	1 082 657 797,17
2	Gedung dan Bangunan	2 231 931 000,00	1 891 924 925 00	340 006 075 00
Jumlah		4 147 223 726,00	2 724 559 853,83	1 422 663 872,17

3.5.3. Aset Lainnya

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertan modal) Aset lainnya diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain Saldo aset lainnya tahun 2024 adalah sebesar **Rp 35.977.000,00** dan tahun 2023 adalah sebesar **Rp 35.977.000,00** Rincian aset lainnya adalah sebagai berikut



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

Tabel 3 5 9
Daftar Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Aset Lain-Lain	66 215 000,00	66 215 000 00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	30 238 000,00	30 238 000,00
	Jumlah	35 977 000,00	35 977 000,00

3.6 Kewajiban

3 6 1. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 623 476 265,00** dan 2023 adalah sebesar **Rp. 1 480.769 704,00** yang terdiri dari

3 6.1 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 0,00** dan **Rp. 0,00**.

3 6.1.2 Utang Belanja

Saldo utang beban tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 295 720 500,00** dan **Rp. 1 286 771 281,00**. Saldo utang belanja per 31 Desember 2024 merupakan utang belanja yang disebabkan adanya belanja terutang atas pembayaran belanja air, belanja internet telepon, jasa konsultansi perencanaan, konsultan dokumen perencanaan pengadaan tanah, dan konsultan studi kelayakan yang akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2025. Rincian utang belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 3 6 1
Rincian Utang Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi I ayanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	98 589 700,00
2	Utang Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	98 813 000,00
3	Utang Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	97 860 900 00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	355 000,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Inernet/TV Berlangganan	101 900 00
	Jumlah	295 720 500,00



3 6 1 3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp 327 755 765,00** dan **Rp 193.998.423,00** Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 merupakan utang jangka pendek lainnya disebabkan adanya belanja terutang atas belanja pengadaan aset tetap tahun 2024 yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025 Rincian utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut

Tabel 3 6 2
Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10 590 000,00
2	Belanja Modal Personal Computer	76 351 351,00
3	Belanja Modal Alat Pendingin	48 536 036
4	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	174 536 036,00
5	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	17 742 342,00
	Jumlah	327 755 765,00

3 7 Ekuitas

Saldo ekuitas tahun 2024 adalah sebesar **Rp 2 635 653 007,17** dan 2023 adalah sebesar **Rp 1.473 748 069,00** Rincian ekuitas adalah sebagai berikut

Tabel 3 7 1
Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	1 473 748 069,00	2 677 009 740 00
Defisit-LO	(12 554 062 119,62)	(14 528 438 313,00)
Koreksi Ekuitas	(27 154 801,21)	35 977 000,00
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	13 743 121 859,00	13 289 199 642,00
Ekuitas Akhir	2 635 653 007 17	1 473 748 069 00



BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN SKPD

4.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 27 April 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin beralamat di Jalan Gubernur H Aberani Sulaiman No 129 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 adalah

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja.

2. Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mempunyai fungsi

- 1 Perumusan Kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja,
- 2 Pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja,



DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode 01 Januari 2024 s d 31 Desember 2024

- 3 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja,
- 4 Pembinaan, pengawasan pengendalian UPT,
- 5 Pengelolaan kesekretariatan, dan
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin terdiri atas

- 1 Sekretariat,
- 2 Bidang Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
- 3 Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
- 4 UPT, dan
- 5 Kelompok Jabatan Fungsional

4.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah 22 orang terdiri dari

- Pejabat Struktural	=	8	orang
- Staf / Pelaksana	=	6	orang
- <u>Jabatan Fungsional</u>	=	<u>8</u>	<u>orang</u>
- Jumlah	=	22	orang

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah 1 orang terdiri dari

- <u>Jabatan Fungsional</u>	=	<u>1</u>	<u>orang</u>
- Jumlah	=	1	orang



BAB V
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun ini sebagai pertanggung jawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut

- 1 Total belanja yang terealisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebesar Rp 13 743 121 859,00 atau 83,91% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp 16 377 888 751,00
- 2 Nilai aset yang dikuasai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3 259 129 272,17
- 3 Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin per 31 Desember 2024 sebesar Rp 623 476 265,00
- 4 Nilai Ekuitas yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2 635 653 007,17

Kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2024 masih ada yang belum tercapai karena ada belanja yang tidak bisa dibayarkan tahun 2024 dan akan dibayarkan pada tahun 2025. Belanja yang tidak bisa dibayarkan atau terutang tersebut sebesar Rp 623 019 365,00 atau 3,80% dari anggaran belanja yang direncanakan.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Tapin.

Rantau, 30 April 2025
KEPALA DINAS,

H. SAPUANI, S.Sos. M.AP
NIP. 19680415 199002 1 003